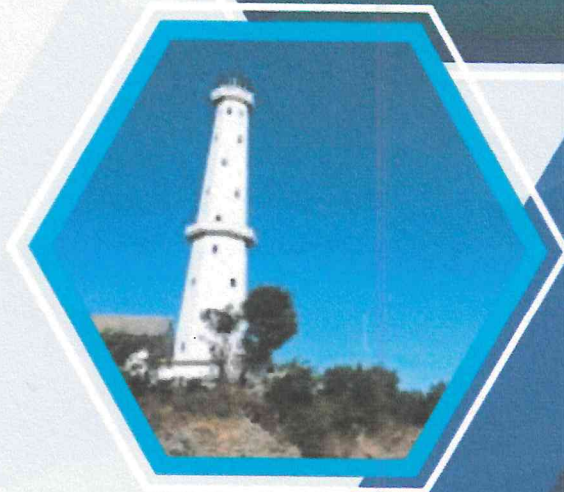




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

2024 PERJANJIAN KINERJA



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2023 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang diatasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **LOLLAN PANJAITAN**
Jabatan : **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

PIHAK KEDUA
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
Program: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis Perhubungan Laut					
SK 6	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	IKK 1	Persentase Peningkatan Alokasi kebutuhan SDM Ditjen Hubla oleh Kemenpan RB berdasarkan kebutuhan	%	10
		IKK 2	Peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perhubungan Laut	Sertifikat	400
		IKK 3	Persentase kehandalan sistem informasi Ditjen Perhubungan Laut	%	90
		IKK 4	Kepuasan publik atas layanan informasi/kehumasan	Skala	4
		IKK 5	Disepakatinya perjanjian Kerja Sama di Bidang transportasi laut	Kerjasama	30
		IKK 6	Nilai AKIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	82
		IKK 7	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Laut	Nilai	3
		IKK 8	Persentase Daya Serap Ditjen Perhubungan Laut	%	97,70
		IKK 9	Pencapaian target penyusunan konsep baru/revisi/ratifikasi regulasi di bidang transportasi laut	Konsep peraturan	20
		IKK 10	Pencapaian Target Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	Status BMN	15

Kegiatan

1. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut
2. Pengelolaan Perencanaan Keuangan BMN dan Umum Transportasi Laut
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut
4. Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut
5. Penunjang Teknis Transportasi Laut

Anggaran

Rp. 22.688.952.000,00-
 Rp. 243.374.856.000,00-
 Rp. 23.020.119.000,00-
 Rp. 7.715.644.000,00-
 Rp. 70.532.368.000,00-

Disetujui

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc
NIP. 19730808 199903 1 003

Jakarta,

2024

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT



LOLLAN PANJAITAN
NIP. 19710125 199703 1 001